

LAPORAN NOTULA

Rapat Pembahasan Usulan Komitmen RAN OGI VII 2023 – 2024 ICW dan LKPP

Senin, 17 November 2022 – Pukul: 09.00 – 15.00

TUJUAN

Rapat pembahasan usulan komitmen untuk RAN OGI VII 2023 – 2024 antara ICW dan LKPP ini bertujuan untuk

1. Membahas ukuran keberhasilan dan matriks target capaian B06 – B24 di dalam komitmen pengadaan barang dan jasa;
2. Mendiskusikan tanggapan K/L terkait matriks target capaian di dalam usulan komitmen pengadaan barang dan jasa di dalam RAN OGI VII 2023 – 2024;

PEMBAHASAN

Ukuran Keberhasilan 1 “Mempublikasi transaksi pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah” melalui e-katalog

1. **Bapak Rangga** selaku perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Untuk Ukuran Keberhasilan 1, saat ini informasi e-katalog untuk transaksi pengadaan barang/jasa ada di dalam menu “monev” di sistem e-katalog.lkpp.go.id, publikasi kebutuhan data yang dibutuhkan perlu dirincikan lagi dan pemanfaatannya akan seperti apa supaya tafsirnya sama;
2. **Ibu Tari** selaku perwakilan dari ICW menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Penambahan spesifikasi data untuk website e-katalog dari usulan ICW dan TII mencakup antara lain pencantuman sumber dana, tahun anggaran, jenis pengadaan, status penyedia, tanggal transaksi, jenis barang/komoditas, harga satuan, harga total, jumlah yang dibeli, status pengiriman, ongkos kirim, penyedia, pembeli, status TKDN, status UMK, tanggal transaksi, tanggal pengiriman, tanggal penerimaan, metode pembelian, histori negosiasi, jenis katalog, dan pagu;
 - Usulan ukuran keberhasilan 1 pada intinya mengharapkan informasi transaksi e-katalog di laman monev e-katalog dapat di klik dan dilihat lebih lanjut rincian paket masing-masing tendernya;
 - Kesepakatan mengenai detail informasi yang akan dipublikasi dapat dimasukkan ke dalam kegiatan pada B06 karena masih memerlukan diskusi dengan Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP;
3. **Ibu Anita** selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP menyampaikan tanggapan dan masukan sebagai berikut:
 - Terkait publikasi sumber dana dari transaksi pengadaan barang/jasa bisa ditemukan di website Sirup (Sistem Informasi Rencana Pengadaan);
 - Pada intinya beberapa spesifikasi data yang diminta ada di website Sirup namun untuk integrasi data yang ada di lain website untuk dimasukkan ke dalam sistem e-katalog perlu adanya diskusi dengan pihak direktorat pengembangan katalog;

Ukuran Keberhasilan 2

1. **Bapak Rangga** menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Penginputan pengadaan darurat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing K/L/PD dimana konsepnya berupa pencatatan dan baru diinput setelah prosesnya selesai;
2. **Ibu Tari** selaku perwakilan dari ICW menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Ukuran keberhasilan 2 menyasar bagaimana memastikan K/L/PD menginput pengadaan darurat dan bagaimana menambah informasi dashboard pengadaan darurat;
 - Penambahan informasi dalam dashboard pengadaan darurat untuk kesepakatannya akan dimasukkan sebagai kegiatan di dalam matriks target capaian;
3. Perwakilan dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Mengenai target capaian mereview perlem PBJ darurat, nantinya penambahan spesifikasi data yang diminta akan terlebih dahulu dimasukan ke dalam DIM untuk Perlem Darurat, bentuk produk hukumnya nanti setelah diskusi baru akan diketahui apakah perbaikan Perlem Darurat atau berupa himbauan semacam SE;

Ukuran Keberhasilan 3

1. **Ibu Ajeng** selaku perwakilan dari Direktorat Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Integrasi inspektorat K/L/PD ke dalam sistem pengaduan saat ini sedang dilakukan oleh LKPP, hingga saat ini sudah ada sekitar 25 inspektorat yang bergabung dan diharapkan akan ada 40 inspektorat yang akan terintegrasi hingga tahun 2024;
 - LKPP sudah mengeluarkan surat pemberitahuan ke inspektorat untuk bergabung ke dalam sistem e-pengaduan dan sosialisasi akan dilaksanakan kembali di bulan Desember
 - Untuk pengembangan API terbuka belum bisa disepakati bisa/tidaknya menunggu respon dari tim teknis dan pimpinan sehingga bisa difollow up lebih lanjut nantinya;
2. **Ibu Tari** selaku perwakilan dari ICW menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Target capaian terkait integrasi inspektorat K/L/PD ke dalam sistem e-pengaduan akan diganti narasinya menjadi menambahkan jumlah inspektorat yang terintegrasi ke dalam e-pengaduan;'

Ukuran Keberhasilan 4

1. **Ibu Anita** selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP menyampaikan tanggapan dan masukan sebagai berikut:
 - LKPP tidak memiliki kewenangan untuk memastikan suatu entitas teridentifikasi sebagai usaha kecil atau hingga mikro menengah, yang memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi sampai ke mikro menengah ada di Kementerian Investasi/BKPM karena BPKM yang bisa melakukan verifikasi dan menerbitkan nomor induk berusaha;
2. Perwakilan dari Direktorat SPSE menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Saat ini LKPP sedang mencoba mengintegrasikan data SIKAP dengan Kementerian Investasi dan yang berjalan sekarang adalah integrasi sudah dilakukan dengan OSS BKPM. Untuk izin usaha terdapat dua metode di SIKAP bisa menarik dari NIB (Nomor Induk Berusaha) atau pun self declare;
 - Di dalam sistem SPSE hanya tersedia kelompok kecil dan non-kecil, untuk kelompok menengah dan besar dikhususkan untuk konstruksi
 - Secara regulasi sedang dilakukan revisi untuk Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana poin revisi salah satunya terkait data BO sudah masuk menjadi salah satu pasal untuk dilakukan deklarasi BO, pada intinya integrasi data BO sedang dilakukan proses PKS dengan Kumham;

Ukuran Keberhasilan 5

1. **Bapak Rian** selaku perwakilan dari Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa LKPP menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - LKPP sudah memiliki MoC untuk umkm dan di tahun 2023 ada rencana untuk berkolaborasi dengan asosiasi umkm;
 - Openonline course juga sudah dimiliki oleh LKPP melalui elearninglkpp.go.id untuk pelatihan umkm dan buku saku juga sudah disusun yang berisikan kurikulum dan target pelatihan;
2. **Ibu Anita** selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Dit. PIUK memiliki kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha (PKP) yang kegiatannya berupa pendampingan pelaku usaha untuk on board di kanal PBJ Pemerintah;
 - Untuk tahun 2023, PKP on site akan dilakukan di DKI Jakarta, Sulsel, dan Jatim ketiga daerah tersebut dipilih karena berdasarkan hasil identifikasi LKPP ketiga daerah ini memiliki binaan terbanyak;

Ukuran Keberhasilan 6

1. **Ibu Tari** selaku perwakilan dari ICW menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Ukuran keberhasilan ini merupakan lanjutan kolaborasi antara LKPP dengan ICW mengenai pengawasan PBJ;
 - Modul audit sosial sedang didrafting oleh ICW, harapannya konten MoC LKPP dapat diintegrasikan ke Akademi Antikorupsi milik ICW;
2. **Bapak Rian** selaku perwakilan dari Pusdiklat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Akan dilakukan inventarisir modul mana saja di Pusdiklat yang akan dimanfaatkan oleh rekan-rekan OMS;
 - Learning Management System di dalam e-learning Pusdiklat LKPP menggunakan Moodle dan sama seperti yang digunakan ICW;

Ukuran Keberhasilan 7

1. **Ibu Anita** selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Mengenai ketersediaan kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dilakukan di tahap perencanaan pengadaan dimana mereka yang bisa mengikat berbagai pengadaan dalam satu proyek yang sama, karena proyek yang sama bisa jadi merupakan lintas K/L/PD;
2. **Bapak Mukti** selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Terpublikasinya informasi dan dokumen PBJ sesuai Perki 1/2021 di SPSE harus melihat juga bagaimana regulasinya di Peraturan LKPP, dokumen-dokumen yang tidak dikeluarkan LKPP (misal dimiliki Kemenkeu) dan yang dimiliki pihak ke-3 (penyedia) boleh dikecualikan untuk tidak dipublikasi menurut LKPP;
 - Kesepakatan mengenai komponen apa yang akan masuk ke dalam SPSE perlu discreening lebih lanjut untuk hanya mencakup apa yang menjadi kewenangan LKPP;

Ukuran keberhasilan 8

1. **Bapak Mukti** selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - Poin keterbukaan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah dimasukkan ke unsur ke-5 dalam Monev Pengadaan Barang/Jasa oleh KIP.

DOKUMENTASI

